

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Asas otonomi memberikan keleluasaan kepada kepala daerah baik di provinsi, kabupaten maupun kota untuk mengelola sumber daya yang dimiliki supaya tujuan pemerintahan dapat tercapai. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat mencapai tujuannya melalui penyerapan anggaran yang maksimal karena setiap daerah dapat memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimilikinya. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Anggaran sebagai kebijakan ekonomi yang berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 menyebutkan bahwa penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Penyerapan anggaran juga merupakan salah satu unsur akuntabilitas keuangan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam era otonomi daerah hingga sekarang, terjadi sebuah fenomena yang menarik yaitu minimnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sebagian besar wilayah Indonesia, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Minimnya penyerapan anggaran tersebut muncul di tengah tuntutan agar pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah semakin transparan dan akuntabel, dalam rangka menuju *good government* dan

juga tuntutan untuk efektif dan efisien menuju konsep pemerintahan yang baru yaitu *New Publik Management* (NPM). Bank Dunia menyebutkan negara-negara berkembang termasuk Indonesia memiliki permasalahan dalam penyerapan anggaran, yang disebut *slow back-loaded* artinya penyerapan rendah pada awal sampai dengan tengah tahun anggaran. Namun melonjak memasuki akhir tahun anggaran (BPKP, 2011).

Akan tetapi pada kenyataannya, fungsi anggaran ini dalam suatu pemerintahan tidak berjalan efektif. Rendahnya penyerapan anggaran merupakan hal yang sering terjadi di daerah. Dengan banyaknya proyek-proyek di daerah yang tidak terlaksana sesuai dengan jadwal, maka penyerapan anggaran pada suatu Dinas menjadi rendah. Ini disebabkan karena para pejabat pembuat komitmen dan Dinas ini khawatir terjatuh persoalan hukum ketika melaksanakan program pembangunan dengan berpedoman pada direksi yang dimilikinya.

Pada artikel yang dimuat pada surat kabar online Mediaharapan.com (4 Maret 2017) yang menyatakan bahwa anggota komisi XI DPR berkunjung menemui kepala perwakilan BPK Jawa Barat dan kepala pusat statistik Provinsi Jawa barat. Menurut Marwan berdasarkan temuan BPK RI bahwa terjadi keterlambatan penyerapan anggaran di pusat maupun daerah, kunjungan anggota komisi XI DPR ini berkaitan dengan kesimpangsiuran masalah penyerapan anggaran daerah yang telah berjalan tiga tahun terakhir.

Penelitian mengenai penyerapan anggaran ini telah banyak diteliti seperti oleh, Ni Luh Putu Lestari Dewi, A.A.N.B. Dwirandra, dan Made Gede Wirakusuma (2017) dalam penelitiannya dengan hasil perencanaan anggaran berpengaruh positif, dan kompetensi berpengaruh negatif pada penyerapan anggaran serta komitmen organisasi tidak mampu memperkuat perencanaan anggaran dan mampu memperkuat kompetensi SDM pada penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Tabanan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel komitmen organisasi pada penelitian terdahulu memoderasi perencanaan anggaran dan kompetensi SDM pada penyerapan anggaran.

Pada penelitian Halimah Lelinta Kaban (2016) menyatakan bahwa perencanaan anggaran, komitmen organisasi, perubahan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, dan perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran melalui kualitas Sumber Daya Manusia sebagai variabel intervening. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran dengan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai variabel intervening di Pemerintah Kabupaten Langkat.

Sedangkan pada penelitian Delia Salas Nirmalasari, Henny Juliani, dan Nabitatus Sa'adah (2016) menyatakan bahwa rendahnya penyerapan anggaran merupakan hal yang sering terjadi di daerah. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran dari pejabat pembuat komitmen dan pengguna anggaran pada dinas tersebut untuk melaksanakan tindakan sesuai kebebasan bertindak yang dimilikinya, meskipun telah diketahui pemerintah daerah telah mengaturnya dalam Peraturan dan Perundang-undangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu mengkaji dalam aspek hukum.

Berdasarkan uraian yang telah dikaji diatas, alasan penulis mengambil topik tersebut adalah karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran sehingga judul yang diambil pada penelitian ini adalah **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi Pada Dinas Provinsi Jawa Barat)”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang didasari oleh fenomena yang ada maka pada penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran pada dinas di Provinsi Jawa Barat.

2. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran pada dinas di Provinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Sebagaimana uraian di atas, maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi mempengaruhi penyerapan anggaran pada Dinas di provinsi Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi penyerapan anggaran.
2. Pengaruh komitmen organisasi mempengaruhi penyerapan anggaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Diharapkan melalui hasil ini dapat memperkaya keilmuan akuntansi terutama dalam akuntansi sektor publik. Diharapkan juga dari hasil penelitian dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terutama terkait dengan penyerapan anggaran dan yang terkait didalamnya.

b. Bagi Auditor Eksternal

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman, referensi dan bahan pertimbangan bagi Auditor eksternal dalam menentukan temuannya dan mengkaji ulang temuannya tersebut.

c. Bagi Dinas

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap Dinas di Provinsi Jawa Barat dalam pencegahan rendahnya penyerapan anggaran dan hal-hal lain yang terkait didalamnya.

